

Perilaku Masyarakat Miskin di Kota Bengkulu dan Model Pengentasan Kemiskinan Berbasis Nilai Sosial-Budaya Lokal

Hajar G. Pramudyasmono

Jurusan Sosiologi FISIP UNIB

Abstract : *This article is written based on a research finding conducted in Bengkulu City using fund from National Strategic Grand, the Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education. The goals of the research are: (1) to find out behavior of poor community contributed to persistent poverty; (2) to formulate an alternative model for poverty alleviation suitable to local social-cultural value. The informants are 60 people selected using purposive sampling method covering poor fishermen, vendors/small micro business, and blue collar labors/casual workers. The data were collected through observation and interviews. Qualitative approach was used to analyze the data. The finding shows that poor community in Bengkulu City tends to behave thrifly (consumptively), is used to owing to private money lender as well as neighbour's kiosk, and prefers to purchase goods in credit/instalment. Based on the data analysis, this research purposes three kinds of different poverty alleviation model for community of fishermen, vendors, and casual workers.*

Keyword : *Poor Community, Poverty, Pemberdayaan, poverty alleviation, Social-Cultural Value.*

Pendahuluan

Meskipun Pemerintah Indonesia telah mencanangkan berbagai program pengentasan kemiskinan - seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), P2KP (Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) - jumlah keluarga miskin di Provinsi Bengkulu hingga saat ini masih cukup banyak, bahkan secara nasional menduduki urutan kesembilan. BPS (2009) mencatat jumlah orang miskin di provinsi ini sebanyak 324.100 jiwa atau 18,59% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, 117.600 orang tinggal di perkotaan dan 206.500 orang lainnya di pedesaan. Mengingat masih besarnya prosentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu, berbagai upaya

perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga miskin.

Kegagalan upaya pengentasan kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor termasuk kebijakan yang bersifat *top down* (dari pusat), rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tidak optimalnya fungsi lembaga-lembaga terkait, kebijakan dan perencanaan yang tidak berbasis pada kondisi dan kebutuhan masyarakat lokal, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, dan ketidak-setaraan atau ketidak-adilan jender (Simanjuntak dkk. 2001; Todaro, 2003). Agar pelaksanaan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan lebih berhasil secara efektif maka perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat ekonomi lemah tetap miskin mengingat bervariasinya penyebab kemiskinan pada masing-masing komunitas.

Secara umum ada tiga jenis kemiskinan ditinjau berdasarkan sumber penyebabnya, yakni kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural, dan kemiskinan kultural (Kartasmita 1996, 239; Baswir 1997; Sumodiningrat 1998, 27). Artikel ini, yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan pada masyarakat asli Kota Bengkulu terutama yang bermata-pencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil dan buruh/kuli (pekerja kasar). Selain itu, artikel ini juga memberi gambaran tentang kondisi kemiskinan pada ketiga komunitas tersebut dan mengusulkan model alternatif pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan nilai sosial-budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam (*in-depth analysis*) persoalan kemiskinan di Kota Bengkulu dengan mengangkat beberapa rumusan masalah. Pertama, bagaimanakah kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat asli Bengkulu ditinjau dari segi ekonomi (kepemilikan aset/kekayaan), sosial (akses ke pelayanan/fasilitas publik), dan budaya (perilaku tidak produktif)? Kedua, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan kemiskinan di kota ini, baik yang bersifat alamiah, struktural maupun kultural? Terakhir, bagaimanakah model pemberdayaan yang sesuai dengan latar-belakang sosial-budaya lokal untuk pengentasan kemiskinan tersebut? Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan program-program pengentasan kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu, terutama di lingkungan yang banyak dihuni oleh keluarga miskin asli Bengkulu. Berhubung penduduk miskin di kota ini pada umumnya bermata-pencaharian sebagai nelayan, pedagang kecil (usaha mikro kecil), dan buruh/kuli (pekerja kasar), maka ketiga komunitas ini

dijadikan obyek (populasi) penelitian. Dengan demikian lokasi yang tepat untuk penelitian adalah sekitar pesisir serta kawasan perdagangan, meskipun ada beberapa responden yang berdomisili di wilayah lain. Penelitian terhadap komunitas nelayan dilakukan di Kelurahan Pasar Bengkulu karena di lokasi ini banyak ditemukan penduduk asli Bengkulu yang bekerja sebagai nelayan sehingga cocok dengan tema penelitian. Adapun kawasan perdagangan yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah seputar Pasar Minggu (termasuk Jalan K.Z. Abidin) dan Pasar Panorama (Lingkar Timur). Kelurahan Tengah Padang dan kampus UNIB (Universitas Bengkulu) juga dipilih sebagai lokasi penelitian mengingat beberapa responden yang memenuhi kriteria sejalan dengan tema penelitian bekerja/berdomisili di kawasan tersebut.

Responden seluruhnya berjumlah 60 orang, masing-masing 20 orang dari kalangan nelayan, pedagang kecil, dan buruh/pekerja kasar. Responden dipilih dengan metode sampel bertujuan (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria sebagai berikut: (i) penduduk (suku) asli Bengkulu yang berdomisili di Kota Bengkulu; (ii) sudah/pernah berkeluarga dan memiliki anak usia 15 tahun ke atas yang masih menjadi tanggungan; dan (iii) miskin, yakni berpenghasilan di bawah Rp 250.000,- per kapita per bulan. Untuk mendapatkan responden yang tepat maka sebelum melakukan wawancara, peneliti (dalam hal ini tenaga lapangan) menanyakan terlebih dahulu kepada responden apakah yang bersangkutan memenuhi kriteria tersebut. Setelah kriteria terpenuhi maka wawancara dilanjutkan.

Data diperoleh melalui pengamatan (*observation*) terhadap sikap dan perilaku responden berkaitan dengan kemiskinan dan mekanisme pemberdayaan. Di samping itu juga dilakukan wawancara (*interview*) dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kemiskinan, faktor-faktor penyebabnya, dan perilaku yang dapat melestarikan kemiskinan. Harapan-harapan responden terhadap mekanisme pemberdayaan juga diakomodasi sehingga dapat dirumuskan model pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan keinginan masyarakat miskin.

Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara simultan bersamaan dengan proses pengumpulan data (*on going analysis*). Proses analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, pemilahan, kategorisasi, evaluasi, membandingkan, melakukan sintesa dan mencermati kembali data yang diperoleh untuk membangun inferensi-inferensi dan menyimpulkan keterikatan antara variabel satu dengan lainnya. Metode ini memberikan peluang untuk terus menerus melakukan pengujian terhadap model pemberdayaan pengentasan kemiskinan berdasarkan bukti-bukti dan data lapangan yang diperoleh secara berulang. Dengan demikian tujuan

untuk memahami secara menyeluruh dan tuntas mengenai aspek-aspek yang diteliti akan dapat dicapai. Dari analisis data ini kemudian dirumuskan model pengentasan kemiskinan yang lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat miskin di Kota Bengkulu adalah melalui pemberdayaan. Pemberdayaan pada dasarnya merupakan suatu proses yang dijalankan dengan kesadaran dan partisipasi penuh dari pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat sebagai sumberdaya pembangunan agar mampu mengenali permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan dan menolong dirinya menuju keadaan yang lebih baik, mampu menggali dan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia untuk kepentingan diri dan kelompoknya, serta mampu mengeksistensikan diri secara jelas dengan mendapat manfaat darinya. Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukan "proses instan". Sebagai suatu proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.

Tahap pertama adalah penyadaran. Masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk eksis. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin diberi pengertian bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Perlu diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat diharapkan proses penyadaran terjadi secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan adanya upaya pendampingan.

Kedua, tahap pengkapasitasan. Tujuannya untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan dalam menangkap peluang usaha. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan meningkatkan ketrampilan (*life skill*) masyarakat miskin. Pada tahap ini dikenalkan sekaligus dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain memampukan masyarakat miskin, baik secara individu maupun kelompok, proses pengkapasitasan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi dapat dilakukan melalui restrukturisasi organisasi. Sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan "aturan main" yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

Tahap terakhir adalah pendayaan. Pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan. Upaya ini dapat ditempuh dengan memberikan peran

yang lebih besar kepada masyarakat miskin secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut. Konsep pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan sebagai mekanisme perencanaan dan pembangunan yang bersifat *bottom up* (usulan dari bawah) yang melibatkan peran-serta masyarakat dalam berbagai kegiatan perencanaan dan pembangunan.

Dalam melakukan pemberdayaan hendaknya diperhatikan karakteristik masyarakat yang bersangkutan ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Mengingat komunitas nelayan, pedagang kecil, dan pekerja kasar memiliki karakteristik berbeda, maka berikut ini diuraikan latar-belakang ekonomi, sosial, dan budaya serta disajikan model pengentasan kemiskinan yang spesifik untuk masing-masing komunitas tersebut.

1. Nelayan Miskin

Secara rata-rata pendapatan nelayan miskin di Kota Bengkulu, tanpa keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi, berjumlah Rp 731.500,- per bulan. Sedangkan pengeluaran bulanan mereka untuk konsumsi mencapai kurang-lebih Rp 1,2 juta. Dengan ditambah pengeluaran untuk membayar listrik, air dan angsuran kredit (bagi sebagian responden) maka pengeluaran bulanan mereka rata-rata mencapai Rp 1,4 juta. Di sini terlihat perbedaaan antara uang masuk dan keluar sekitar Rp 700.000,- yang berarti keluarga nelayan miskin pada umumnya mengalami defisit keuangan.

Dari hasil pengamatan dan wawancara dapat diketahui bahwa penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan meliputi faktor alamiah, struktural, dan kultural. Kota Bengkulu dan sekitarnya mengalami hujan hampir sepanjang tahun. Pada bulan September hingga Desember biasanya terjadi hujan disertai angin barat dan badai kencang. Pada waktu-waktu seperti ini, nelayan tidak berani melaut. Hujan saja sudah menjadi penghalang untuk melaut karena perahu mereka tidak dilengkapi dengan atap, apalagi pada musim badai, kapal besar pun tidak dapat melaut. Oleh karena itu kalau dirata-ratakan nelayan kecil di Kota Bengkulu hanya bekerja lima belas hari setiap bulannya. Dalam bulan-bulan bagus (mulai Februari sampai Agustus) penghasilan nelayan kecil berkisar antara Rp. 750.000,- hingga Rp 1 juta per bulan, sedangkan pada musim badai penghasilan mereka hanya separuhnya. Kendala alam lainnya yang dihadapi oleh para nelayan kecil adalah arus laut yang deras akibat gerakan angin timur. Faktor alam sebagaimana disebutkan di atas telah menjadi salah satu penyebab kemiskinan nelayan di Kota Bengkulu.

Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan utama yang bersifat struktural pada keluarga nelayan meliputi dominasi kapal *trawl* dan kapal bagan milik juragan kaya yang menjadi saingan nelayan kecil dalam penangkapan ikan. Menurut penuturan responden, sebelum adanya kapal *trawl* di sekitar daerah operasi mereka, penghasilan nelayan kecil cukup melimpah. Kapal *trawl* yang dilengkapi alat tangkap modern sangat berpengaruh negatif terhadap hasil tangkapan nelayan kecil. Keadaan seperti ini diperburuk lagi dengan kehadiran kapal modern jenis lain, yaitu kapal bagan. Kapal jenis ini dilengkapi dengan lampu-lampu yang dapat menarik perhatian ikan-ikan dalam radius dua kilometer. Menurut penuturan nelayan kecil, dengan beroperasinya kapal bagan ini hasil tangkap mereka telah berkurang separohnya. Mereka mengharapkan pengaturan daerah operasi kapal *trawl* dan bagan oleh pemerintah agar penghasilan mereka tidak terlalu rendah.

Faktor struktural lain yang ikut mempengaruhi kemiskinan nelayan adalah tingkat pendidikan mereka dan keterampilan anggota keluarga yang rendah. Generasi tua nelayan miskin pada umumnya tidak menyelesaikan Sekolah Dasar. Hanya beberapa dari mereka yang menamatkan SD dan sangat sedikit yang sampai menamatkan SMP. Untuk generasi yang lebih muda, sudah ada beberapa yang telah menamatkan SMP dan SMA. Pendidikan nelayan yang rendah ini diperburuk dengan keterampilan anggota keluarga (khususnya para istri) yang juga rendah. Para istri mereka hanya menjualkan hasil tangkapan atau hasil bagi dari tangkapan, ikut membantu mengambil hasil tangkapan perahu selodang (perahu pinggir) dan sangat sedikit dari mereka yang membuka usaha berjualan di pantai wisata.

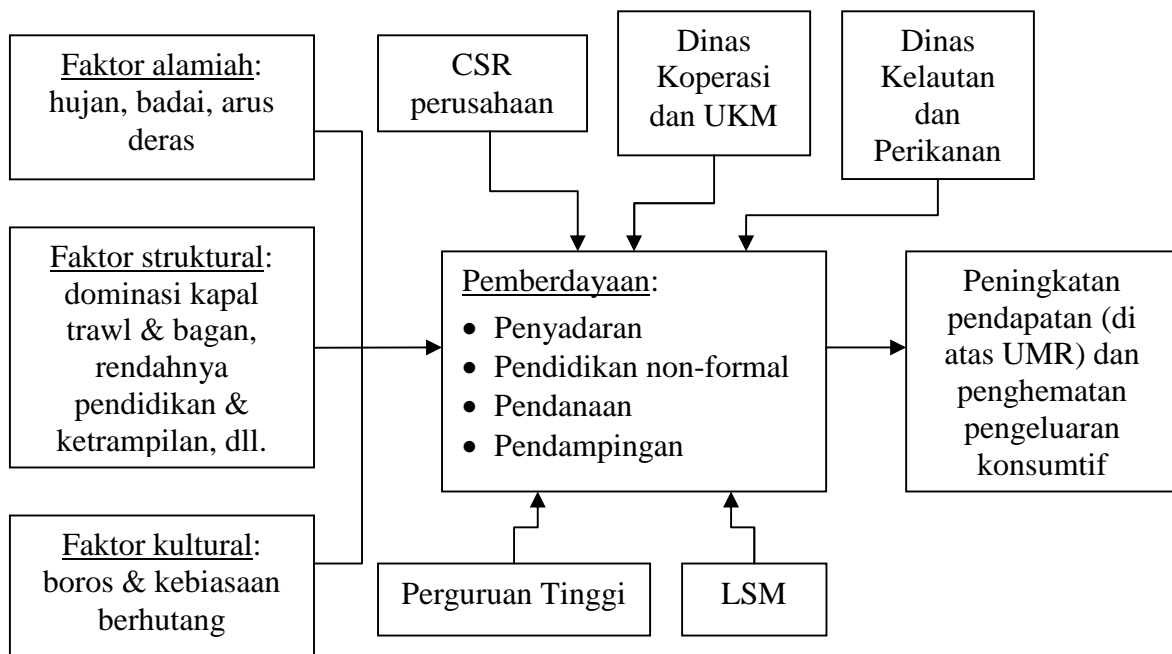
Birokrasi pemerintah yang tidak tepat dalam menentukan sasaran bantuan juga merupakan faktor penyebab kemiskinan struktural pada nelayan. Menurut pengakuan responden, pemerintah telah melakukan kesalahan dengan memberi bantuan perahu dan alat tangkap kepada warga non-nelayan. Di samping itu, pemerintah juga dinilai setengah-setengah dalam membantu nelayan miskin, misalnya memberi bantuan perahu tanpa mesin atau memberi mesin tanpa perahu dan alat tangkap.

Faktor kultural yang berkontribusi kepada kemiskinan nelayan adalah sikap hidup boros dan kebiasaan berhutang. Dalam kondisi miskin nelayan masih melakukan upacara-upacara pernikahan, kematian, dan kelahiran di luar kemampuan mereka. Khusus untuk pernikahan, ada beberapa keluarga nelayan yang mengeluarkan dana sampai Rp 15 juta padahal menurut pengakuannya penghasilan mereka dari pekerjaan sebagai nelayan hanya Rp 750.000,- per bulan. Karena ketidakseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran, keluarga nelayan terpaksa berhutang ke rentenir. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan

sehari-hari mereka berhutang ke warung tetangga. Ini dilakukan khususnya pada masa-masa paceklik dari September hingga Desember, yang dikenal sebagai musim angin barat atau badai.

Berkaitan dengan faktor-faktor penyebab kemiskinan pada keluarga nelayan sebagaimana diuraikan di atas maka model pengentasan kemiskinan yang diusulkan adalah pemberdayaan melalui penyadaran, pendidikan non-formal, pendanaan, dan pendampingan. Alur pemikiran tersebut dapat diskemakan sebagai berikut:

Bagan 1: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Nelayan Miskin



Upaya pengentasan kemiskinan pada keluarga nelayan di Kota Bengkulu dapat dilakukan antara lain dengan memberikan penyadaran tentang kemampuan adaptif dalam menghadapi kondisi alam yang menjadi kendala perolehan hasil tangkapan. Selain itu juga penyadaran bahwa mereka bisa mengentaskan keluarganya dari kemiskinan. Penyadaran dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan LSM. Dalam jangka pendek, yakni dalam kondisi nelayan tidak memiliki perahu modern dan alat tangkap yang memadai, penyadaran difokuskan pada upaya agar nelayan miskin bisa mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi anggota keluarganya untuk bekerja apa saja yang mungkin dan pantas dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga yang masih defisit dan di bawah garis kemiskinan. Perlu juga disadarkan bahwa mereka harus merubah pola hidup boros dan sikap

kurang berani mengkritik perilaku birokrasi yang tidak profesional. Di samping itu, perlu disadarkan bahwa mereka bisa menyikapi penegakan hukum di laut yang kurang berpihak kepada nasib nelayan kecil. Upaya yang tidak kalah penting adalah kesadaran kepada keluarga nelayan untuk menambah wawasan (meningkatkan pengetahuan) dengan cara belajar dan bekerja terus menerus.

Nelayan miskin harus diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan non-formal (pengetahuan dan keterampilan) yang relevan dan mempraktekannya melalui bekerja. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah mendidik dan melatih anggota keluarga, khususnya yang belum bekerja. Ibu rumah-tangga (istri) para nelayan yang belum terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat diberi pengetahuan tentang wirausaha dan berbagai ragam ketrampilan yang berhubungan dengan pengolahan ikan. Untuk anak-anak nelayan yang cukup umur dan belum terlibat dalam kegiatan ekonomi, mereka perlu diajak berfikir dan mengamati peluang kerja yang bisa dilakukan. Salah satu peluang usaha yang memungkinkan untuk dilakukan di Kota Bengkulu adalah mencari batu-bara yang hanyut di Sungai Serut karena bekerja seperti ini bisa menghasilkan Rp 750.000,- per bulan.

Untuk mendukung pendidikan dalam arti luas bagi masyarakat nelayan, khususnya yang miskin, perlu dibangun perpustakaan kelurahan yang koleksinya minimal memuat hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Koleksi tersebut dapat berupa surat kabar lokal dan nasional, majalah, CD atau DVD, dan buku-buku. Terbukanya akses informasi akan menambah wawasan nelayan miskin. Dengan adanya informasi tentang keberhasilan daerah tertentu dalam mengatur atau bahkan melarang operasi kapal *trawl*, misalnya, nelayan miskin di Kota Bengkulu dapat terinspirasi untuk menuntut hal serupa. Kemudian adanya informasi tentang jenis usaha alternatif juga dapat menggerakkan nelayan miskin untuk meninggalkan profesi nelayan yang sudah tidak menarik lagi akibat terdesak oleh nelayan kapal *trawl* dan bagan.

Untuk melakukan aktivitas penyadaran dan pendidikan yang bertumpu pada peran Perguruan Tinggi dan LSM sebagai fasilitator diperlukan dana yang cukup besar dan ini harus diusahakan dalam jangka menengah. Dalam jangka pendek, dana yang perlu diusahakan adalah untuk proses penyadaran melalui pertemuan-pertemuan rutin nelayan dengan Perguruan Tinggi dan LSM, dan juga dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta pihak pengusaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR, tanggungjawab sosial perusahaan). Proses penyadaran ini dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan secara formalnya dan terus dilakukan dalam kesempatan-kesempatan yang memungkinkan selama pendampingan. Setelah tiga bulan penyadaran, terus dilanjutkan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang wirausaha. Materi pelatihan hendaknya

difokuskan pada upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap penjualan ikan hasil tangkapan.

Dalam jangka menengah, yakni dua hingga tiga tahun, perlu diusahakan adanya dana simpan-pinjam di kalangan nelayan miskin. Ini bisa dilakukan melalui peran pendampingan yang membantu mereka membentuk kelompok dengan struktur organisasi yang sederhana. Pembentukan kelompok simpan-pinjam bagi nelayan miskin dapat dilakukan setelah penghasilan mereka surplus, berhasil menekan pola hidup boros, dan mendapatkan hasil dari optimalisasi pemanfaatan anggota keluarga dalam kegiatan ekonomi. Setelah mereka mampu mengelola dana simpan-pinjam secara mandiri, baru diusahakan pemberian pinjaman dana yang sumbernya berasal dari CSR perusahaan dan/atau pemerintah.

Pendampingan, bahkan advokasi dalam kasus-kasus tertentu, sangat diperlukan untuk membina nelayan miskin karena pada umumnya mereka mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan diri. Pembentukan kelompok usaha bagi keluarga nelayan miskin perlu dilakukan sebagai wadah kebersamaan yang berorientasi pada perbaikan kehidupan. Agar pembinaan kelompok berlangsung lebih efektif, pemerintah dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pun LSM. Dalam rangka pembinaan, pendamping hendaknya mengupayakan peningkatan kualitas SDM dan kemampuan usaha bagi para anggota serta pengurus kelompok. Untuk jangka pendek, kelompok usaha yang dibentuk hendaknya terdiri atas anggota keluarga nelayan miskin yang belum bekerja.

2. Pedagang Kecil

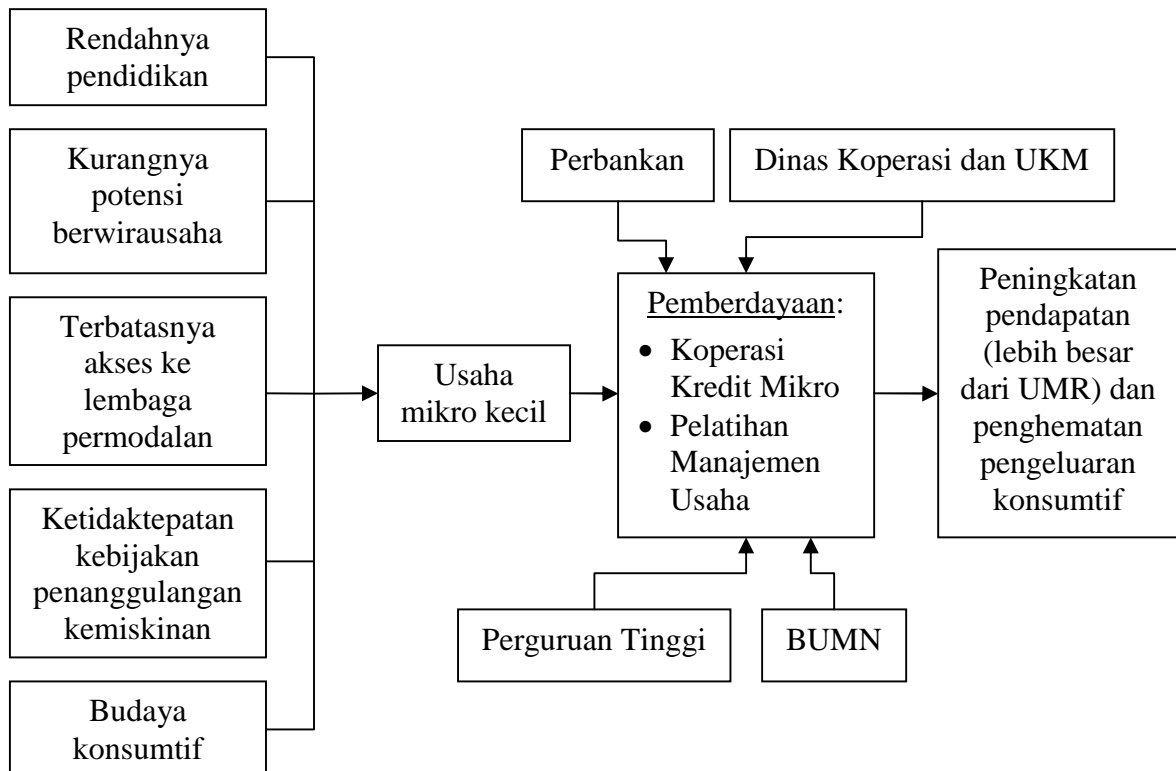
Para pedagang kecil (pelaku usaha mikro kecil) pada umumnya memiliki pendapatan (keuntungan) antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 1,7 juta per bulan. Dari keseluruhan komunitas pedagang kecil yang diteliti terdapat 65% responden yang hanya mendapat keuntungan antara Rp 200.000,- hingga Rp 500.000,- per bulan. Ini berarti mereka hidup di bawah upah minimum regional (UMR) Provinsi Bengkulu yang pada 2008 telah mencapai Rp 685.000,-

Dari segi pendidikan, mayoritas pedagang kecil (85% responden) berpendidikan sangat rendah yaitu hanya sampai tingkat SMP sehingga pengetahuan mereka terbatas yang membuat mereka tidak berdaya. Di samping itu, belum ada di antara mereka yang pernah memperoleh pelatihan terkait dengan bagaimana memberdayakan diri sendiri atau kelompok terutama pelatihan kewirausahaan atau manajemen usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diformulasikan model alternatif pengentasan kemiskinan bagi keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil) di Kota

Bengkulu, antara lain berupa pemberdayaan usaha mikro kecil melalui koperasi kredit mikro. Selain itu juga perlu adanya upaya pemberdayaan yang dilakukan melalui pelatihan manajemen usaha. Model alternatif pengentasan kemiskinan tersebut dapat diskemakan sebagai berikut:

Bagan 2: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Pedagang Kecil



Salah satu alternatif pemberdayaan bagi pedagang kecil adalah dengan menciptakan mekanisme perguliran dana melalui wadah/lembaga keuangan milik masyarakat yang disebut Koperasi Kredit Mikro. Pembentukan koperasi semacam ini hendaknya didukung pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi dan UKM. Di samping itu juga perlu campur-tangan dunia usaha (perbankan dan BUMN) agar kebutuhan pembiayaan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah berkembang cepat tanpa terhambat oleh sumber pendanaan. Selama ini usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan dananya lebih banyak bergerak dan bersentuhan dengan sistem perbankan yang memiliki peraturan ketat sehingga akses terhadap sumber pendanaan dari bank menjadi sulit.

Pengertian dana bergulir pada prinsipnya dana tersebut harus tetap berada dan digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat setempat secara

berkelanjutan. Bantuan dana untuk kegiatan ekonomi yang dipinjamkan kepada masyarakat harus dikembalikan disertai dengan jasa pinjaman (bunga) yang kemudian digulirkan kembali kepada masyarakat. Secara tersirat ada misi bahwa bantuan harus dipandang sebagai stimulan (modal) untuk mendanai kegiatan ekonomi produktif yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Lembaga keuangan yang muncul dari prakarsa masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan hasilnya dinikmati oleh masyarakat sendiri tentunya relatif mudah dilestarikan dan ditumbuhkembangkan seiring dengan dinamika ekonomi masyarakat bersangkutan.

Kebijakan memberi akses permodalan melalui pinjaman merupakan metode yang cukup bagus untuk memberdayakan masyarakat miskin, meskipun bukan satu-satunya strategi pemberdayaan yang paling baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pemberdayaan masyarakat, penggunaan pendekatan tunggal tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu perlu dikembangkan pendekatan lain untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif, antara lain berupa pelatihan kewirausahaan dan pembinaan manajemen usaha. Dengan dilakukannya pelatihan kewirausahaan maupun pembinaan manajemen usaha secara berkelanjutan terhadap keluarga pedagang kecil (usaha mikro kecil) maka diharapkan akan ada perbaikan dalam mengelola usaha sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi usaha menengah yang selanjutnya kesejahteraan masyarakat miskin semakin meningkat.

3. Pekerja Kasar

Pekerja kasar dalam penelitian ini terdiri atas buruh angkut belanjaan di pasar, tukang ojek sepeda motor (termasuk penarik becak), penjaga/tukang parkir, dan tukang sapu (*cleaning service*). Mereka berpenghasilan antara Rp 700.000,- hingga Rp 2,5 juta dan pengeluaran Rp 750.000,- sampai dengan Rp 2,1 juta per bulan. Hampir 50% responden komunitas pekerja kasar mengaku bahwa pengeluarannya melebihi pendapatannya. Strategi yang mereka tempuh untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan cara berhutang barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya ke warung tetangga. Hutang tersebut mereka bayar tatkala keluarga mendapatkan rejeki (penghasilan) banyak. Kebiasaan “gali lubang, tutup lubang” semacam ini mereka lakukan untuk mempertahankan hidup. Bahkan ada sebagian responden yang penghasilannya digunakan untuk mengangsur kredit pakaian atau pun televisi. Ini mengindikasikan bahwa budaya konsumtif (meski dalam skala kecil) masih mewarnai kehidupan mereka.

Ditinjau dari segi kepemilikan sarana transportasi, telekomunikasi dan informasi maka diperoleh gambaran bahwa hampir semua responden (85%) telah

memiliki sepeda atau pun sepeda motor, telepon genggam (*hand phone*), radio, dan televisi. Bahkan ada beberapa keluarga (20% responden) yang memiliki lebih dari dua hingga tiga sepeda motor. Menurut pengakuan mereka, barang-barang tersebut digunakan sebagai sarana kerja dan untuk meningkatkan pamor/gengsi sosial (*social prestige*). Hanya sedikit dari responden (15%) yang tidak memiliki sarana transportasi, telekomunikasi atau pun informasi. Keluarga responden pada umumnya membeli barang-barang dengan cara kredit/mengangsur. Padahal pembelian semacam ini jatuhnya akan lebih mahal bila dibanding dengan pembelian secara kontan. Akibatnya mereka tetap berada dalam kondisi kekurangan sebab sebagian dari upah/penghasilan yang sudah kecil harus dialokasikan untuk membayar hutang, bukan disisihkan untuk menabung atau sebagai modal untuk melakukan diversifikasi usaha.

Untuk mencukupi kebutuhan hidup, 70% responden menyatakan bahwa anggota keluarga yang tinggal serumah dan masih menjadi tanggungannya (termasuk istri, anak yang telah dewasa atau pun menantu) juga terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif seperti berjualan jagung bakar, berjualan sayur, buruh giling cabe, pembantu rumah-tangga, dan buruh cuci baju. Beberapa responden masing-masing anaknya bekerja sebagai tukang ojek sepeda motor, kuli bangunan, karyawan rendahan di BRI, dan ada yang menantunya bekerja sebagai pencari batu-bara yang hanyut di Sungai Serut. Adapun responden tukang sapu perempuan masing-masing suaminya bekerja sebagai buruh bangunan dan penjual minyak tanah. Pendapatan yang diperoleh anggota keluarga berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 1,5 juta per bulan.

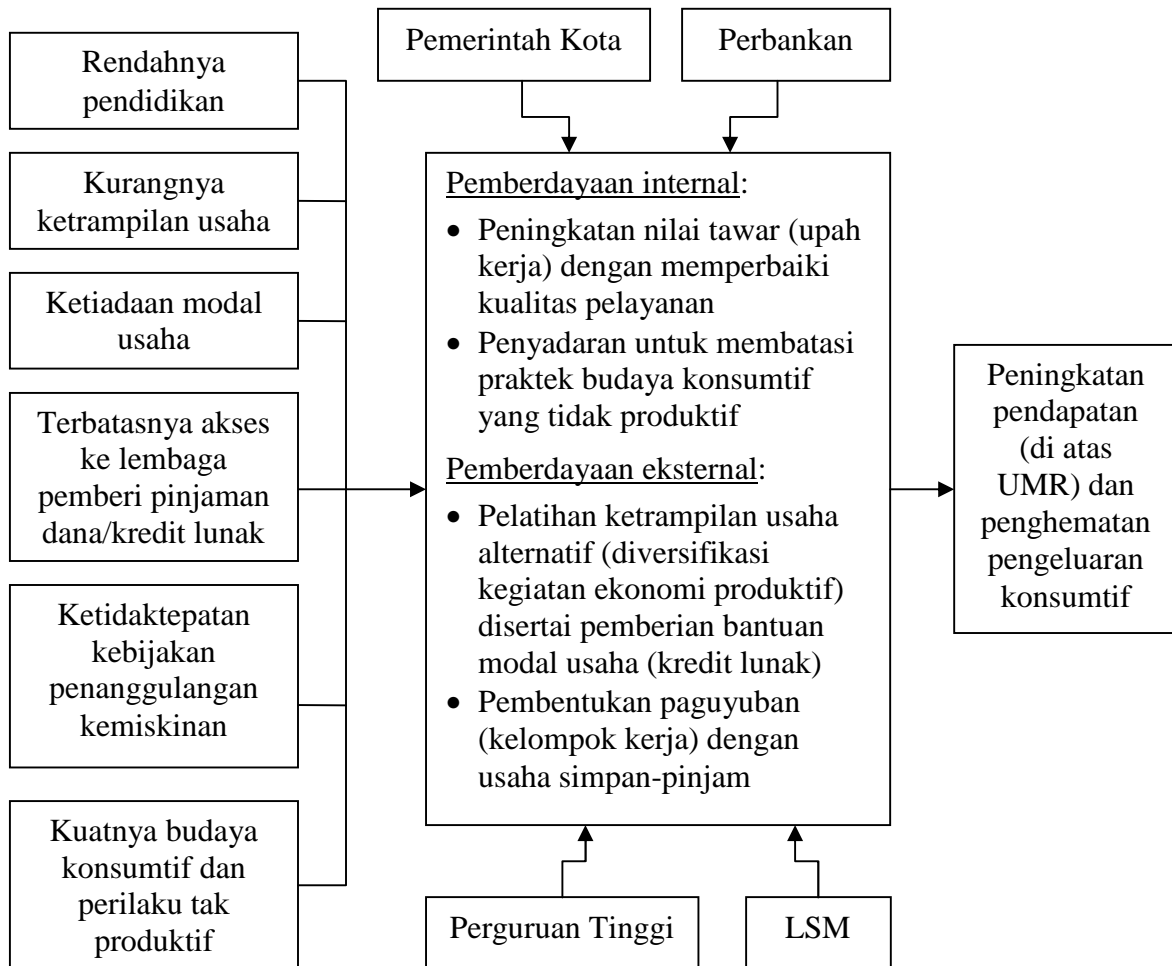
Pekerja kasar di Kota Bengkulu dan keluarga pada umumnya giat bekerja. Kepala keluarga rata-rata bekerja antara delapan hingga 12 jam per hari, dari pagi hingga sore hari. Sedangkan anggota keluarga yang ikut mencari nafkah pada umumnya bekerja lebih dari lima jam setiap harinya. Ini mengindikasikan bahwa etos kerja mereka cukup tinggi. Jadi penyebab keluarga pekerja kasar tetap miskin di Kota Bengkulu bukanlah kemalasan namun lebih dikarenakan faktor struktural, yakni rendahnya upah kerja.

Faktor lain yang ikut berperan dalam melanggengkan kemiskinan di kalangan keluarga pekerja kasar di Kota Bengkulu adalah masih kuatnya budaya konsumtif, yang antara lain tercermin dari "keberanian" berhutang (membeli barang-barang secara kredit) seperti televisi, sepeda motor, bahkan pakaian. Selain itu mereka juga cenderung melakukan hajatan besar-besaran, baik dalam ritual kelahiran anak, pesta pernikahan, maupun peringatan kematian anggota keluarga. Ada 45% responden yang pernah menyelenggarakan pesta pernikahan besar-besaran, bahkan ada di antara mereka yang menghabiskan dana hingga Rp 12 juta. Beberapa keluarga (40% responden) pernah melakukan ritual kelahiran

anak dan/atau peringatan kematian anggota keluarga dengan mengeluarkan uang sekitar Rp 300.000,- sampai Rp 2,5 juta. Ada juga responden yang mengeluhkan bahwa anaknya sering minta uang untuk jajan sehingga menambah pengeluaran keluarga. Responden lainnya menuturkan bahwa masyarakat nelayan pada umumnya suka minum-minuman keras dan masih memegang prinsip "*beras secupak ikan sejerek, madar*" yang berarti bahwa hidup ini cukup apabila telah memiliki satu kaleng beras dan seikat ikan. Meskipun telah mulai pudar, budaya semacam ini bisa menghambat keberhasilan program pengentasan kemiskinan di Kota Bengkulu.

Ada beberapa harapan yang terekam dari hasil wawancara. Pertama, hampir semua responden tidak/belum pernah terlibat dalam program pengentasan kemiskinan sehingga mereka menginginkan adanya perhatian lebih serius dari pemerintah yang antara lain berupa pemberian pinjaman/bantuan uang dengan syarat dan prosedur mudah untuk mengembangkan usaha alternatif. Selanjutnya, mereka menginginkan adanya pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif, kredit perumahan murah, kegiatan padat karya bagi masyarakat, bahkan ada responden yang minta disediakan lahan untuk perkebunan. Ada juga responden yang menginginkan agar anaknya mendapatkan biaya sekolah (beasiswa). Selain itu, responden meminta agar pemerintah menstabilkan harga sembako (sembilan bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula, minyak goreng, dan sebagainya). Kemudian beberapa responden dari kalangan tukang/penjaga parkir menginginkan agar Pemerintah Kota menaikkan tarif parkir dan menertibkan pembagian kawasan parkir sehingga pendapatan tukang parkir tersebut meningkat.

Ada beberapa langkah alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan taraf hidup keluarga buruh/pekerja kasar di Kota Bengkulu. Upaya-upaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni pemberdayaan internal dan pemberdayaan eksternal. Skema dan uraian berikut menjelaskan model alternatif yang bisa diadopsi untuk pengentasan kemiskinan mereka.

Bagan 3: Model Alternatif Pemberdayaan pada Keluarga Pekerja Kasar

Pemberdayaan internal berarti upaya meningkatkan potensi diri yang harus dilakukan sendiri secara aktif oleh buruh/pekerja kasar dan keluarganya. Keterlibatan pihak luar hanya sebatas sebagai motivator dan fasilitator. Peningkatan potensi diri antara lain berupa perbaikan kualitas kerja/pelayanan dan nilai tawar (upah kerja kompetitif) yang menguntungkan. Ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang kompeten dan menaruh perhatian terhadap peningkatan pendapatan/kesejahteraan keluarga miskin dengan cara memberikan dorongan (penyuluhan) kepada para pekerja kasar untuk bekerja secara profesional, jujur, dan ramah sehingga konsumen puas dengan pelayanannya dan berkenan memberikan imbalan yang lebih besar. Selain itu, pemberdayaan internal dapat dilakukan melalui penyadaran kepada para pekerja kasar dan keluarganya untuk membatasi pengeluaran yang tidak produktif, seperti biaya hajatan dan pesta pernikahan yang besar. Kemudian juga menghentikan kebiasaan minum-

minuman keras yang dapat merusak kesehatan dan memboroskan anggaran, serta mengendalikan diri untuk tidak membeli barang-barang secara kredit dengan bunga tinggi. Sedangkan pemberdayaan eksternal mengacu pada upaya peningkatan potensi diri para pekerja kasar dan keluarganya dengan melibatkan secara aktif pihak lain, seperti Pemerintah Kota, perbankan (lembaga pemberi kredit lunak), Perguruan Tinggi, dan aktivis LSM. Pemberdayaan eksternal dapat berupa pemberian bantuan modal untuk pengembangan usaha alternatif. Diversifikasi usaha perlu dilakukan oleh keluarga pekerja kasar di Kota Bengkulu apabila pasar menjanjikan, dan di lain pihak penghasilan mereka dari bekerja sebagai buruh/pekerja kasar tetap relatif kecil. Di samping itu, pemberian bantuan/kredit perumahan murah dan beasiswa (keringanan biaya pendidikan anak) sebagaimana diminta oleh beberapa responden perlu juga diwujudkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarga mereka. Selanjutnya, untuk mencegah keluarga pekerja kasar berhutang uang ke rentenir yang bunganya tinggi maka perlu dikembangkan usaha simpan-pinjam dengan bunga ringan, baik di lingkungan RT (Rukun Tetangga) maupun organisasi serikat pekerja. Ini dapat dilakukan oleh Pemerintah setempat bekerjasama dengan perbankan (BRI atau Bank Bengkulu, misalnya). Adapun peran dari Perguruan Tinggi dan/atau LSM antara lain dapat berupa advokasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aspek hukum, pemberian motivasi untuk berusaha/bekerja keras, fasilitator pelatihan ketrampilan, pendampingan, dan sebagainya.

Simpulan

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa faktor penyebab kemiskinan pada komunitas nelayan di Kota Bengkulu ada tiga: alamiah, struktural, dan kultural. Faktor penyebab kemiskinan alamiah antara lain berupa hujan lebat, badai, dan arus/gelombang deras sehingga nelayan tidak dapat melaut karena mereka hanya bermodal perahu motor tempel kecil atau bahkan hanya memiliki perahu dayung/sampan yang sangat riskan terkena terjangan ombak. Penyebab kemiskinan berikutnya adalah faktor struktural, yakni keberadaan kapal bagan dan *trawl* (pukat harimau) yang mendominasi tangkapan, serta rendahnya tingkat pendidikan/ketrampilan nelayan beserta anggota keluarganya. Pada umumnya pendidikan nelayan rendah, yaitu tidak tamat dan tamat SD. Hanya ada beberapa orang yang berpendidikan SMP dan SMA. Tingkat pendidikan anggota keluarga nelayan miskin juga rendah sehingga tidak mampu berpartisipasi (belum terlibat) dalam kegiatan ekonomi yang dapat menambah penghasilan keluarga untuk mengurangi defisit bulanan. Meskipun demikian, mereka berperilaku boros seperti tercermin dari pelaksanaan pesta perkawinan secara besar-besaran di luar

kemampuan mereka. Ini merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang bersifat kultural. Upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk pengentasan kemiskinan pada keluarga nelayan adalah melalui penyadaran, pendidikan non-formal/pelatihan ketrampilan, pendanaan (pemberian bantuan dana), dan pendampingan.

Selain menyoroti kehidupan nelayan miskin, penelitian ini juga mengungkapkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya pedagang kecil (usaha mikro kecil). Rata-rata kelompok responden ini mempunyai keuntungan antara Rp 250.000,- dan Rp 1,7 juta per bulan. Mereka pada umumnya meminjam uang kepada rentenir (yang mereka sebut "koperasi") dengan bunga mulai 20% hingga 30% per bulan. Pedagang dalam skala mikro kecil mempunyai perilaku konsumtif, rata-rata hanya berpendidikan SD dan SMP, dan tidak pernah mendapat pelatihan kewirausahaan maupun manajemen usaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengentasan kemiskinan pada keluarga pedagang kecil adalah dengan melakukan pemberdayaan usaha mikro kecil melalui: Pertama, pembentukan Koperasi Kredit Mikro yang harus dilakukan oleh pedagang/pengusaha mikro kecil sendiri dengan didukung oleh pihak perbankan, dinas terkait (Dinas Koperasi dan UKM), dan BUMN. Kedua, Pelatihan Manajemen Usaha yang bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha agar usaha para pedagang kecil bisa lebih berkembang sehingga mereka menjadi sejahtera. Dalam hal ini Perguruan Tinggi dan LSM memegang peranan penting dalam memberikan pelatihan.

Obyek terakhir dari penelitian adalah para buruh/pekerja kasar. Mereka berpenghasilan bulanan antara Rp 400.000,- (tukang sapu) hingga Rp 2,1 juta (kuli angkut barang). Sementara itu, pengeluaran keluarga mereka berkisar antara Rp 750.000,- sampai Rp 2,1 juta. Beberapa responden menyatakan bahwa pengeluaran bulanan keluarga mereka lebih besar daripada pendapatannya. Untuk mengatasi ketimpangan ini, anggota keluarga responden (suami/istri, bahkan anak/menantu yang masih tinggal serumah) ikut bekerja mencari nafkah. Upaya lain yang ditempuh oleh keluarga responden dalam mempertahankan hidup di saat-saat kekurangan adalah dengan cara pinjam uang ke rentenir maupun ke warung tetangga. Bahkan untuk membeli barang-barang seperti pakaian dan televisi pun juga mereka lakukan dengan cara mengangsur/kredit dengan bunga cukup tinggi. Perilaku semacam ini dapat melanggengkan kemiskinan. Perilaku lain yang mewarnai kehidupan keluarga buruh miskin/pekerja kasar di Kota Bengkulu adalah sikap boros, yang antara lain tercermin dalam penyelenggaraan pesta perkawinan besar-besaran, hajatan/ritual kelahiran, kematian, bahkan ada pula yang suka mabuk-mabukan (minuman keras).

Pengentasan kemiskinan pada kaum buruh/pekerja kasar di Kota Bengkulu dapat dilakukan melalui pemberdayaan internal dan pemberdayaan eksternal. Pemberdayaan internal (dari diri individu/keluarga) mencakup perbaikan kinerja/kualitas layanan kepada konsumen sehingga meningkatkan nilai jual jasa mereka, dan kesadaran untuk membatasi pengeluaran konsumtif yang tidak bermanfaat (kurang produktif). Sedangkan pemberdayaan eksternal (perlu campur-tangan pihak luar) antara lain dapat berupa pemberian pelatihan keterampilan usaha alternatif (bagi yang menginginkan diversifikasi usaha) dibarengi dengan pemberian kredit/pinjaman lunak dan pendampingan. Di samping itu, perlu juga dibentuk paguyuban (asosiasi pekerja) yang keanggotaannya terdiri atas pekerja sejenis dengan usaha simpan-pinjam dalam rangka menyediakan pinjaman dana (kredit) lunak sehingga kaum buruh/pekerja kasar tidak terus-menerus terjerat hutang ke rentenir.

Daftar Pustaka

- Adi, Isbandi Rukminto (2002), *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Seri Pemberdayaan Masyarakat 021, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.
- Baswir (1997), *Macam-macam Kemiskinan Struktural*, [Diakses 15 September 1997] <http://id.Syaifulbahriunair>.
- BPS (Maret 2009), *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Provinsi*, [Diakses 1 April 2010] <http://www.bps.go.id>.
- Hagedorn, Robert (1990), *Sociology*, Toronto: Dave Dimmell.
- Kananlua, Paulus S. dkk. (2009), *Model Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara*, Hasil Penelitian Strategis Nasional DP2M Dirjen Dikti, Universitas Bengkulu, Bengkulu.
- Karsidi, Ravik (2002), *Pemberdayaan Masyarakat Kecil*, Makalah Semiloka Pemberdayaan Masyarakat di Jawa Tengah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Jateng, Semarang 4 - 6 Juni 2002.
- Kartasasmita, Ginandjar (1996), *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Pramudyasmono, Hajar G. (1999), *A Critique of the Takukesra Program: Alleviating Poverty in Indonesia*, M.A. Thesis, Flinders University, Adelaide.
- (1997), *The IDT Program and Poverty Alleviation in Indonesia*, B.A. Honours Thesis, Flinders University, Adelaide.

- Quibria, M.G. (1991), "Understanding Poverty: An Introduction to Conceptual and Measurement Issues," *Asian Development Review*, Vol 2, No. 2. pp. 91 – 112.
- Sikhondze, Wilson B. (1999), "The Role of Extension in Farmer Education and Information Dissemination in Swaziland", *Journal Adult Education and Development*, No. 53/1999, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, Bonn: 112/DVV.
- Simanjuntak, L., dkk. (2001), "Ketidakadilan Gender," *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 23 – 26.
- Soetrisno, R. (2001), *Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pembebasan Kemiskinan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999), *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Todaro, M. & S.C. Smith (2003), *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
- World Bank (2003), *Poverty: Vulnerabilities, Social Gaps, and Rural Dynamics*, Washington D.C.
- Wrihatnolo, Randy R. & Riant N. Dwidjowijoto (2007), *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*.